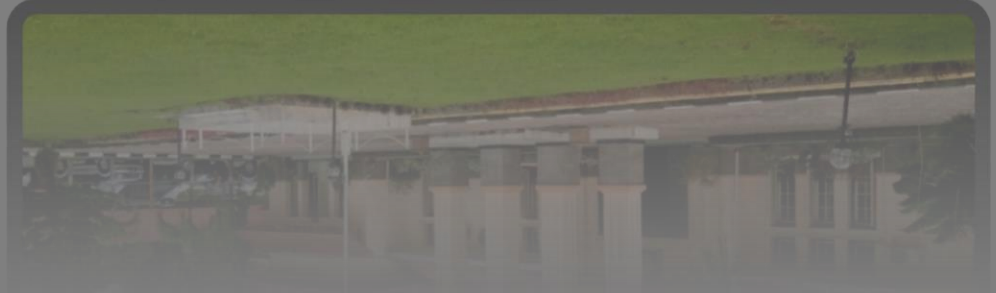




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB



PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN
Jalan Cendrawasih No. 2 Pekalongan



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUTAJI , S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Dr.Hj.SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Januari 2020

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

Dr.Hj.SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum.
Hakim Utama

H. SUTAJI, S.H., M.H.
Hakim Madya Utama

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
5.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	80
6.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90
8.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100
9.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	80
11.	Terwujudnya Proses Peradilan	Persentase Perkara Pidana Anak yang	2

	yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Diselesaikan dengan Diversi	
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
13.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
15.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 6.006.860.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 25.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 205.180.000,-

Pekalongan, Januari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah

Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
Kelas IB

Dr.Hj.SRI SUTATIEK, S.H.,M.Hum.
Hakim Utama

H. SUTAJI,S.H., M.H.
Hakim Madya Utama

